

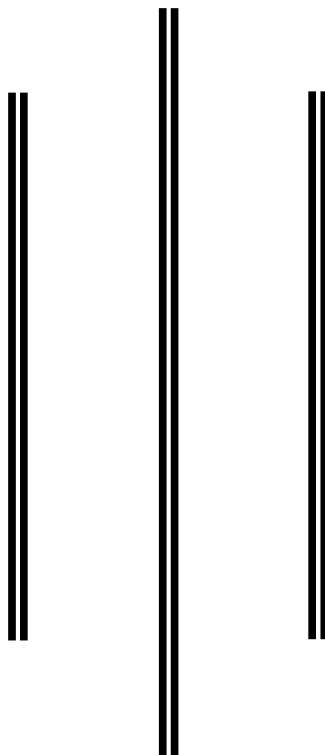


PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2007

TENTANG

eGOVERNMENT



Diperbanyak oleh :

**BADAN INFORMASI DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2007**



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2007

TENTANG

eGOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal di Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi yang terpadu;
 - b. bahwa sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dilaksanakan untuk mewujudkan eGovernment berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang eGovernment;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional maka ketentuan mengenai Kerangka Pengembangan eGovernment perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG eGOVERNMENT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. eGovernment adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien
5. Rencana Pengembangan eGovernment adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan eGovernment yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
6. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kota Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari pengaturan eGovernment adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan eGovernment Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan dari pengaturan eGovernment adalah :

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan eGovernment untuk seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi eGovernment Kota Yogyakarta.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan eGovernment adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan eGovernment yang mengacu kepada Dokumen Master Plan eGovernment Pemerintah Kota Yogyakarta

BAB IV DOKUMEN MASTER PLAN eGOVERNMENT

Pasal 4

- (1) Dokumen Master Plan eGovernment merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
- a. pernyataan visi dan misi;
 - b. strategi pengembangan;
 - c. cetak biru pengembangan;
 - d. tahapan pengelolaan; dan
 - e. implementasi.
- (2) Dokumen Master Plan eGovernment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN eGOVERNMENT

Pasal 5

- (1) Pengembangan eGovernment Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:
- a. Tahap I dilaksanakan dari tahun 2007-2011;
 - b. Tahap II dilaksanakan dari tahun 2012-2016 ;
 - c. Tahap III dilaksanakan dari tahun 2017-2021;
 - d. Tahap IV dilaksanakan dari tahun 2022-2026.
- (2) Tahapan Pengembangan eGovernment sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan strategi pengelolaan eGovernment dan merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Master Plan eGovernment.

BAB VI PENGEMBANGAN eGOVERNMENT

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan eGovernment Pemerintah Daerah adalah instansi yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi.

- (2) Pengembangan eGovernment oleh instansi yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan eGovernment oleh instansi yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dilaksanakan dengan melibatkan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Instansi yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dalam pengembangan eGovernment dapat membentuk Tim Kegiatan Pengembangan eGovernment yang terdiri dari :
 - a. Panitia Pelaksana;
 - b. Tim koordinasi penilaian usulan kegiatan;
 - c. Tim perumus.
- (2) Unsur yang duduk dalam tim, Tugas dan Tata Kerja Tim Kegiatan Pengembangan eGovernment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi eGovernment Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta ;
- b. Sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

- (1) Instansi yang membidangi teknologi dan informasi dalam pengembangan eGovernment wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan eGovernment sesuai tahapan pengembangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Pengelola eGovernment wajib menyampaikan laporan pengelolaan eGovernment kepada Walikota melalui Kepala Instansi yang membidangi teknologi dan informasi.
- (3) Tahapan pengembangan eGovernment dapat dievaluasi jika dipandang perlu.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Instansi yang membidangi teknologi dan informasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2007 SERI D

**LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA**
NOMOR : 78 Tahun 2007
TANGGAL : 15 Desember 2007

MASTER PLAN *eGOVERNMENT*
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan *eGovernment* menuju *good governance* konsep *eGovernment* diterapkan disetiap pemerintah daerah. Model penerapan *eGovernment* setiap lembaga akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap lembaga pemerintah. Hal ini akan menentukan struktur data dan model bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan.

Pengembangan *eGovernment* seluruh faktor yang mempunyai andil dalam menciptakan (menghasilkan) suatu jasa layanan publik. Seluruh faktor tersebut perlu dirancang dari awal melalui proses perencanaan yang matang agar dapat dihasilkan program pengembangan *eGovernment* dapat diterapkan mulai dari faktor kepemimpinan (*leadership*), sumber daya manusia, organisasi dan sistim manajemen, sarana komunikasi, piranti keras, piranti lunak, anggaran (dana) dan lain- lain harus dipadukan ke dalam satu skenario perencanaan terpadu, holistik, bertahap, realistik dan terukur.

Model penerapan *eGovernment* setiap lembaga pemerintah disusun dalam bentuk rencana Induk Pengembangan *eGovernment* dan memuat tahapan pengembangan dan penerapan *eGovernment* dalam bentuk :

- a. Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga (*eGovernment Conceptual Framework*);
- b. Cetak Biru Pengembangan (*eGovernment Blue Print*);
- c. Solusi Pentahapan Pengembangan (*eGovernment Roadmap*);
- d. Rencana Implementasi (*eGovernment Implementation Plan*).

B. Pernyataan Visi

Mewujudkan *eGovernment* unggul dalam rangka *Good Governance*

C. Pernyataan Misi

- (3) Mewujudkan *eGovernment* terpadu dalam lingkup internal pemerintah.
- (4) Mewujudkan *eGovernment* dalam lingkup pelayanan kepada masyarakat.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Master Plan *eGovernment* untuk mendukung Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Rencana Induk Pengembangan *eGovernment* baik, sesuai dengan kondisi, keinginan dan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Tujuan disusunnya *Master Plan eGovernment* terciptanya sebuah Rencana Induk Pengembangan *eGovernment* acuan dalam membangun *eGovernment* Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan *good governance*.

E. Batasan Pengertian / Ketentuan Umum

7. *Master Plan* adalah rancangan induk yang digunakan sebagai acuan.
8. *eGovernment* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan wahana informasi yang mampu menghasilkan (pemerintahan / ketataprajaan yang baik (*good governance*) pemerintah yang bersih (*clean government*)).
9. *Database Management System* adalah suatu paket perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan dan perawatan basis data.
10. *Clean government* adalah pemerintahan yang bersih.
11. *Good governance* adalah suatu ketataprajaan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara cepat, akurat, dan tepat waktu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketahanannya.
12. *Web based application* adalah aplikasi yang berbasis pada *protokol web*.
13. *Web services* adalah adalah sebuah teknologi perangkat lunak berbasis standar yang membolehkan pemrogram dan integrator untuk mengkombinasikan sistem atau aplikasi yang ada, baik yang baru maupun yang sudah ada dalam sebuah cara baru melalui internet dalam lingkungan perusahaan atau antar perusahaan.
14. *Common Services* adalah layanan dalam aplikasi yang dapat dipakai secara bersama-sama oleh beberapa aplikasi sekaligus.
15. *Mobile Device* adalah perangkat elektronik, komunikasi yang dapat digunakan secara bergerak

BAB II

STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi pengembangan *eGovernment* Yogyakarta dapat dijabarkan ke dalam Program lima tahunan sebagai berikut :

1. Tahap PERSIAPAN

Tahap persiapan meliputi :

- f. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga,
- g. Penyiapan SDM,
- h. Penyiapan sarana akses yang mudah serta sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- i. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memulai tahapan ini beberapa saat yang lalu, ditunjukkan dengan adanya situs informasi pada hampir seluruh instansi. Situs ini telah menjadi salah satu media informasi instansi kepada masyarakat. Disamping itu sejumlah SDM yang kompeten dalam bidang *eGovernment* telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun demikian situs- situs ini perlu disempurnakan dan SDM yang ada tetap perlu mendapatkan pencerahan pengetahuan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mengingat perkembangan teknologi tersebut yang sedemikian cepat.

2. Tahap PEMATANGAN

Dalam tahap pematangan dilakukan unifikasi terhadap semua aplikasi penyebaran informasi yang sudah dikembangkan. Ada 3 aktifitas utama dalam tahapan ini :

- a) Pertama adalah menyusun data base terpadu beserta situs pendukung yang menampung kepentingan internal maupun untuk kepentingan pelayanan untuk menjamin keterhubungan dengan lembaga lain. Oleh karena itu diperlukan suatu sensus yang menyeluruh terhadap semua aktivitas sistem informasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga dapat disusun data base terpadu yang tepat.
- b) Aktifitas kedua adalah peningkatan kesadaran sumber daya aparatur pemerintah dalam menangani data dan informasi. Aktifitas ini diharapkan akan dapat mengubah budaya kerja yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- c) Aktifitas ketiga adalah penyesuaian teknologi informasi dan komunikasi yang sedang dipakai dengan teknologi yang lebih sesuai. Salah satu penyesuaian yang harus dilakukan adalah penerapan sistem pengamanan jaringan dan informasi.

3. Tahap PEMANTAPAN

Pada tahapan ini pemantapan aplikasi layanan ini meliputi :

- a) Penyesuaian tata laksana organisasi (*standar operating procedure*) dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik internal maupun untuk pelayanan.
- b) Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik

4. Tahap PEMANFAATAN

Perkembangan fasilitas yang disediakan pemerintah baik berupa sarana akses informasi, pendidikan, perpustakaan, maupun aplikasi yang bisa dimanfaatkan secara luas baik G2G, G2B maupun G2C.

BAB III

CETAK BIRU PENGEMBANGAN

A. Penjabaran strategi dan rencana strategis *eGovernment*

Sehubungan dengan strategi tersebut maka pengembangan *eGovernment* dari instansi-instansi yang melayani kebutuhan internal, selanjutnya ke instansi yang melayani masyarakat, maka penjabaran strategi dan rencana strategis *eGovernment* Pemerintah Kota Yogyakarta ditargetkan :

1. Sistem yang terpadu
2. Penyusunan standar teknologi *eGovernment*
3. Strategi investasi
4. Pemisahan aplikasi *Intranet* dengan *Extranet*.
5. Pemberdayaan Sinergi Kerjasama Pengumpulan data
6. Sistem Database Terdistribusi yang Terpadu
7. *Single sign-on system* untuk user
8. *Peningkatan* Komitmen Pimpinan
9. *Pembudayaan* teknologi informasi dan komunikasi
10. SDM
11. Sarana Pembelajaran on-Line untuk Aparatur Pemerintah
12. Pembangunan *Knowledge Management System*
13. Sistem
14. Penentuan Kebijakan Operasi Sistem *eGovernment*
15. Peningkatan Kerjasama dengan pihak ketiga (*Outsourcing*)
16. Penasehat
17. Fasilitas pengelolaan informasi untuk masyarakat
18. Fasilitas Layanan Aplikasi untuk UKM dan masyarakat luas
19. Penyediaan sarana akses informasi (*Community Access Center*)
20. Pembangunan infrastruktur akses informasi
21. dan Keselamatan
22. Perlu komponen aplikasi untuk layanan bersama (*Common Services*)
23. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan on-line
24. Peraturan Perundangan

Untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi pemerintahan, berikut ini merupakan taksonomi untuk setiap Blok Fungsi, Sub-Blok Fungsi dan Modul :

Tabel 1.1 Identifikasi dan Klasifikasi Fungsi Pemerintahan

Blok Fungsi	1. PELAYANAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	1.1. Kependudukan dan Catatan Sipil 1.2. Perpajakan dan Retribusi 1.3. Pendaftaran dan Perijinan 1.4. Bisnis dan Investasi 1.5. Pengaduan Masyarakat 1.6. Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
Blok Fungsi	2. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	2.1. Surat Elektronik 2.2. Sistem Dokumen Elektronik 2.3. Sistem Pendukung Keputusan 2.4. Kolaborasi dan Koordinasi 2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan
Blok Fungsi	3. LEGISLASI
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu Daerah 3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan
Blok Fungsi	4. PEMBANGUNAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan 4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
Blok Fungsi	5. KEUANGAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	5.1. Sistem Anggaran 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan 5.3. Sistem Akuntansi Daerah
Blok Fungsi	6. KEPEGAWAIAN
Sub-Blok Fungsi	--
Modul	6.1. Pengadaan PNS 6.2. Sistem Presensi dan Penggajian 6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan
Blok Fungsi	7. DINAS DAN LEMBAGA
Sub-Blok Fungsi	7.1. KEPEMERINTAHAN
Modul	7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah 7.1.2. Katalog Barang Daerah 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah
Sub-Blok Fungsi	7.2. KEWILAYAHAN
Modul	7.2.1. Tataruang dan Lingkungan Hidup 7.2.2. Potensi Daerah 7.2.3. Kehutanan 7.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 7.2.5. Perikanan dan Kelautan 7.2.6. Pertambangan dan Energi 7.2.7. Pariwisata 7.2.8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Sub-Blok Fungsi	7.3. KEMASYARAKATAN
Modul	7.3.1. Kesehatan 7.3.2. Pendidikan 7.3.3. Ketenagakerjaan 7.3.4. Industri dan Perdagangan 7.3.5. Jaring Pengaman Sosial
Sub-Blok Fungsi	7.4. SARANA DAN PRASARANA
Modul	7.4.1. Transportasi 7.4.2. Jalan dan Jembatan 7.4.3. Terminal dan Pelabuhan 7.4.4. Sarana Umum

BAB IV
TAHAPAN PENGELOLAAN

Strategi pengelolaan *eGovernment* Kota Yogyakarta dapat dijabarkan tahapan program empat tahunan yaitu :

A. Pembangunan Jangka Menengah Tahap I (2007-2011)

Tabel 5.1 Pembangunan Jangka Menengah Tahap I

No	Komponen	Tahun Ke				
		I	II	III	IV	V
(3)	Infrastruktur aplikasi	a. Identifikasi aplikasi, data dan jaringan komunikasi di seluruh instansi b. Pemetaan kebutuhan data, jaringan dan aplikasi yang terkait dengan implementasi e-Government c. Pengembangan dan peningkatan situs instansi	d. Bisnis proses mapping, untuk identifikasi proses bisnis yang ada di seluruh dinas, kecamatan, kelurahan dan instansi terkait dengan layanan e-Government e. Penentuan standard operating procedure dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan didukung oleh implementasi e-government f. Penyesuaian aplikasi dengan hasil business process mapping	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi layanan dan aplikasi di semua sektor pemerintahan • Penyusunan pusat data (data senter) beserta kamus data yang dapat diakses oleh semua pihak yang akan mengembangkan sistem di lingkungan Pemkot Yogyakarta • Pembuatan basis data terpadu di lingkungan Pemkot Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan web services / komponen-komponen dasar aplikasi e-Government • Pengembangan sistem yang berkelanjutan • Pengujian dan pemantapan keamanan dan kehandalan system 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem yang berkelanjutan • Pengujian dan pemantapan keamanan dan kehandalan system

Tabel 5.1 (Lanjutan)

No	Komponen	Tahun Ke				
		I	II	III	IV	V
(4)	Layanan e-Government	d. Identifikasi kebutuhan dan spesifikasi eGovernment sampai dengan integrasi data e. Penyediaan infrastruktur yang memadai	j. Membentuk kesadaran masyarakat k. Pengembangan aplikasi e-Government	l. Pengembangan aplikasi e-Government	m. Pengembangan aplikasi e-Government	n. Pemanfaatan SIN sebagai kunci layanan publik
(5)	Sumberdaya Manusia	a. Sosialisasi e-Government b. Sosialisasi Master Plan e-Government c. Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk komunikasi data d. Pelatihan Pengolahan Data e. Pelatihan Pengelolaan Database f. Pelatihan Pengelolaan Proyek e-Government g. Pelatihan Pengelolaan Situs Instansi h. Pelatihan	i. Pelatihan Pemanfaatan Data j. Pelatihan Pengolahan Data k. Pelatihan Pengelolaan Database l. Pelatihan Pengelolaan Situs Instansi m. Pelatihan Pengelolaan Jaringan n. Pelatihan Pengelolaan Proyek e-Government	o. Pelatihan Perawatan Teknologi Informasi p. Pelatihan Pengelolaan Database	q. Pelatihan Perawatan Teknologi Informasi r. Pelatihan Pengelolaan Database	(4) Pelatihan Perawatan Teknologi Informasi (5) Sosialisasi tentang pentingnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Keamanan sistem (6) Pelatihan Pengamanan Sistem

		Pengelolaan Jaringan				
(6)	Infrastruktur Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi jenis dan kuantitas kebutuhan Sistem Pendukung, meliputi: sistem pendukung infrastruktur informasi, infrastruktur aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem pendukung SDM • Perencanaan sumber dan besarnya dana pengadaan sistem pendukung dan keberlanjutan pengadaan dana 	Pengadaan sistem pendukung: (5) Infrastruktur informasi, seperti: sarana dan metode backup informasi, sistem arsip dokumen digital (6) Infrastruktur Aplikasi, seperti: menentukan <i>third party</i> untuk <i>outsourcing</i> (7) Infrastruktur jaringan, seperti: pembelian sarana backup sumber listrik (genset, UPS)	(3) Maintenance Sistem Pendukung	(4) Menentukan key performance indikator kesuksesan sistem pendukung jangka pendek (satu tahunan) jangka menengah (5 tahunan) dan jangka panjang (20 tahunan)	
(7)	Infrastruktur jaringan	a. Pengadaan workstation Pengadaan server Pemasangan <i>Bandwidth</i> b. Pemasangan sistem <i>security</i> c. Pembangunan stasiun akses bagi masyarakat d. Pengadaan sarana pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan workstation • Penambahan stasiun akses bagi masyarakat 	(3) Updating workstation (4) Penambahan server (5) Peningkatan <i>Bandwidth</i> (6) Pemantapan sistem security (7) Penambahan stasiun akses bagi masyarakat (8) Penambahan sarana pendukung jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian teknologi • Penambahan stasiun akses bagi masyarakat 	Updating server Peningkatan Bandwidth Peningkatan sistem security Penambahan stasiun akses bagi masyarakat
(8)	Peraturan	a. Pengesahan draft	• Sosialisasi raperda	• Implementasi raperda	• Persiapan revisi	• Pengesahan revisi

		raperda dan master plan	dan master plan <ul style="list-style-type: none">• Persiapan pembuatan perda SIN	dan master plan <ul style="list-style-type: none">• pembuatan perda tentang SIN	raperda dan master plan	raperda dan master plan
--	--	-------------------------	---	---	-------------------------	-------------------------

B. Pembangunan Jangka Menengah Tahap II (2012-2016)

Tabel 5.2 Pembangunan Jangka Menengah Tahap II

No	Komponen	Tahun Ke				
		I	II	III	IV	V
1.	Infrastruktur aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem yang berkelanjutan • Pengujian dan pemantapan kemandirian dan kehandalan system • Perluasan layanan kepada masyarakat dengan menyediakan pusat-pusat layanan online ditempat umum • Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem yang berkelanjutan • Pengujian dan pemantapan kemandirian dan kehandalan system • Perluasan layanan kepada masyarakat dengan menyediakan pusat-pusat layanan online ditempat umum • Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem yang berkelanjutan • Pengujian dan pemantapan kemandirian dan kehandalan system • Penyesuaian teknologi yang digunakan dengan perkembangan dan sesuai business mapping layanan pada masyarakat dan prioritas tahun anggaran berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem yang berkelanjutan • Pengujian dan pemantapan kemandirian dan kehandalan system • Penyesuaian teknologi yang digunakan dengan perkembangan dan sesuai business mapping layanan pada masyarakat dan prioritas tahun anggaran berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem yang berkelanjutan • Pengujian dan pemantapan kemandirian dan kehandalan system • Penyesuaian teknologi yang digunakan dengan perkembangan dan sesuai business mapping layanan pada masyarakat dan prioritas tahun anggaran berjalan
2.	Layanan e-Government	Pengembangan layanan e-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data	Pengembangan layanan e-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data	Pengembangan layanan e-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data	Pengembangan layanan e-Government sesuai kebutuhan layanan dengan SIN sebagai identitas data	Pengembangan layanan e-Government masyarakat mandiri

Tabel 5.2 (Lanjutan)

No	Komponen	Tahun Ke				
		I	II	III	IV	V
3.	Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen Sistem Informasi • Pelatihan Pengamanan Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen Sistem Informasi • Pelatihan Pengamanan Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen Sistem Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen Sistem Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Knowledge Management System • Pelatihan SDM Berkelanjutan dengan e-Learning
4.	Infrastruktur Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sistem pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan sistem pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Updating / revisi teknologi dan metode sistem pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi keberhasilan sistem pendukung berdasarkan key performance indikator tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dana untuk pengadaan sistem pendukung
5.	Infrastruktur jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan workstation • Penambahan stasiun akses bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan workstation • Pengadaan server • Pemasangan bandwidth • Pemasangan sistem security • Pembangunan stasiun akses bagi masyarakat • Pengadaan sarana pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian teknologi • Penambahan stasiun akses bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Updating workstation • Penambahan server • Peningkatan Bandwidth • Pemantapan sistem security • Penambahan stasiun akses bagi masyarakat • Penambahan sarana pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan workstation • Penambahan stasiun akses bagi masyarakat
6.	Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Raperda e-Government, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi 		<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pembuatan perda tentang dokumen elektronik dan transaksi elektronik (e-Payment) 	<ul style="list-style-type: none"> • pembuatan perda tentang dokumen elektronik dan transaksi elektronik (e-Payment) 	

C. Pembangunan Jangka Menengah Tahap III (2017-2021)

Tabel 5.3 Pembangunan Jangka Menengah Tahap III

No	Komponen	Tahun Ke				
		I	II	III	IV	V
(5)	Infrastruktur aplikasi	e. Integrasi aplikasi dan data di semua instansi Pemkot Yogyakarta f. Pengembangan kantor digital dan layanan digital	g. Pengembangan kantor digital dan layanan digital h. Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat	i. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah daerah lain (G2G) j. Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat	k. Pengembangan aplikasi cerdas untuk eksekutif l. Pengembangan kantor digital dan layanan digital	m. Pengembangan aplikasi cerdas untuk eksekutif
(6)	Layanan e-Government	Pemantapan layanan e-Government terintegrasi	c. Pemantapan layanan e-Government terintegrasi	d. Pemantapan layanan e-Government terintegrasi	e. Pemantapan layanan e-Government mandiri	f. Pemantapan layanan e-Government mandiri
(7)	Sumberdaya Manusia	g. Pembangunan <i>Knowledge Management System</i> h. Pelatihan SDM Berkelanjutan dengan e-Learning	i. Pembangunan <i>Knowledge Management System</i> j. Pelatihan SDM Berkelanjutan dengan e-Learning	k. Pelatihan Pemanfaatan <i>Knowledge Management System</i> untuk Pelayanan kepada masyarakat	l. Pelatihan Pemanfaatan <i>Knowledge Management System</i> untuk Pelayanan kepada masyarakat	m. Pelatihan Pemanfaatan <i>Knowledge Management System</i> untuk Pelayanan pada masyarakat
(8)	Infrastruktur Informasi				16. Evaluasi keberhasilan system pendukung berdasarkan key performance indikator	Evaluasi keberhasilan system pendukung berdasarkan key performance indikator

Tabel 5.3 (Lanjutan)

No	Komponen	Tahun Ke				
		I	II	III	IV	V
(9)	Infrastruktur jaringan	17. Updating server 18. Peningkatan <i>Bandwidth</i> 19. Peningkatan sistem <i>security</i> 20. Penambahan stasiun akses bagi masyarakat	21. Penambahan workstation 22. Penambahan stasiun akses bagi masyarakat	23. Pengadaan workstation 24. Pengadaan server 25. Pemasangan <i>Bandwidth</i> 26. Pemasangan sistem <i>security</i> 27. Pembangunan stasiun akses bagi masyarakat 28. Pengadaan sarana pendukung	29. Penyesuaian teknologi 30. Penambahan stasiun akses bagi masyarakat	31. <i>Updating</i> workstation Penambahan server 32. Peningkatan <i>Bandwidth</i> 33. Pemantapan sistem <i>security</i> 34. Penambahan stasiun akses bagi masyarakat 35. Penambahan sarana pendukung 36. Evaluasi infrastruktur jaringan
(10)	Peraturan	37. Pembuatan raperda tentang dokumen elektronik		38. Pembuatan perda tentang e-Payment		Evaluasi pelaksanaan peraturan

D. Pembangunan Jangka Menengah Tahap IV (2022-2026)

Tabel 5.4 Pembangunan Jangka Menengah Tahap IV

No	Komponen	Tahun Ke				
		I	II	III	IV	V
1.	Infrastruktur aplikasi	n. Pembuatan sistem informasi eksekutif o. Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan bisnis <i>mapping</i> layanan dan prioritas anggaran	p. Pembuatan sistem informasi eksekutif q. Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan bisnis <i>mapping</i> layanan dan prioritas anggaran	r. Pembuatan sistem Pelaporan on line otomatis s. Optimalisasi dan otomatisasi layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan bisnis <i>mapping</i> layanan dan prioritas anggaran	t. Pembuatan sistem Pelaporan <i>on line</i> otomatis	u. Evaluasi dan Penyesuaian layanan aplikasi dengan teknologi baru
2.	Layanan e-Government			39. Transaksi elektronik sebagai dasar pelayanan	Transaksi elektronik sebagai dasar pelayanan	Transaksi elektronik sebagai dasar pelayanan
3.	Sumberdaya Manusia	n. Pembangunan <i>Knowledge Management System</i> o. Pelatihan SDM Berkelanjutan dengan e-Learning sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan implementasi e-Government	p. Pembangunan <i>Knowledge Management System</i> q. Pelatihan SDM Berkelanjutan dengan e-Learning sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan implementasi e-Government	r. Pelatihan Pemanfaatan <i>Knowledge Management System</i> untuk Pelayanan kepada masyarakat	s. Pelatihan Pemanfaatan <i>Knowledge Management System</i> untuk Pelayanan kepada masyarakat	t. Pelatihan Pemanfaatan <i>Knowledge Management System</i> untuk Pelayanan pada masyarakat

Tabel 5.4 (Lanjutan)

No	Komponen	Tahun Ke				
		I	II	III	IV	V
4.	Infrastruktur Informasi					
5.	Infrastruktur jaringan	40. Penambahan workstation 41. Penambahan stasiun akses bagi masyarakat	42. Pengadaan workstation 43. Pengadaan server 44. Pemasangan <i>Bandwidth</i> 45. Pemasangan sistem security 46. Pembangunan stasiun akses bagi masyarakat 47. Pengadaan sarana pendukung	48. Penyesuaian teknologi 49. Penambahan stasiun akses bagi masyarakat	50. Updating workstation Penambahan server 51. Peningkatan <i>Bandwidth</i> 52. Pemantapan sistem security 53. Penambahan stasiun akses bagi masyarakat 54. Penambahan sarana pendukung	55. Penambahan workstation 56. Penambahan stasiun akses bagi masyarakat 57. Evaluasi infrastruktur jaringan
6.	Peraturan		58. Pembuatan Raperda e-Government tentang pemantapan e-Government di masyarakat			Evaluasi pelaksanaan peraturan

BAB V

IMPLEMENTASI

A. Manajemen Perubahan

Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan terhadap apa yang sudah direncanakan didalam tahapan pengembangan. Perubahan dapat dikategorikan ke dalam kelompok

1. Perubahan Sistem Basis Data

Sistem basis data terdistribusi yang terpadu sebagai baseline-utama dalam pengembangan sistem *eGovernment* Kota Yogyakarta memerlukan unifikasi, simplikasi atau eliminasi integrasi dari sistem basis data yang telah ada. Perubahan hendaknya dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan rencana.

2. Perubahan Sistem Informasi

Sistem basis data yang terpadu menuntut adanya perubahan dalam alur informasi dan metode penyediaan/sharing informasi layanan baik internal maupun eksternal. Untuk menjamin terlaksananya perubahan ini, diperlukan peraturan daerah untuk mengawal terlaksananya sistem manajemen informasi yang terpadu.

3. Perubahan dalam Sistem Aplikasi

Sudah cukup banyak aplikasi *eGovernment* telah dibuat oleh sejumlah pemerintah daerah, baik untuk keperluan internal maupun untuk layanan publik. *Operation system* aplikasi yang dibuat menggunakan berbagai standar yang berbeda, hal ini terjadi karena pembanguna basisdata dan aplikasinya berasal dari sejumlah konsultan yang berbeda. Adanya perbedaan-perbedaan diatas memerlukan strategi pengembangan aplikasi yang terstandarisasi memanfaatkan outsourcing baik dari swasta maupun perguruan tinggi

4. Perubahan dalam Organisasi

Perubahan tanpa kepemimpinan dapat dianalogikan sebagai berlayar tanpa kapten kapal. Sebaik-baiknya konsep *eGovernment* digunakan, tanpa adanya kepemimpinan yang mendukung perubahan, maka dapat dibayangkan bahwa *eGovernment* hanya menjadi sebuah pajangan dalam perjalanan suatu organisasi. Dalam kontekstual kenegaraan, peran kepemimpinan adalah sangat besar, atau malah dapat dikatakan sangat krisual. Tidak akan terjadi perubahan tanpa dorongan inisiatif dari seorang pemimpin untuk melakukan perubahan, baik yang datang dari dalam maupun intervensi dari luar. Pendapat bahwa hanya dengan inisiatif dan komitmen dari pemimpin sudah cukup untuk mensukseskan perubahan, tidaklah sepenuhnya benar. Memang dukungan pimpinan puncak sangat penting, tetapi harus diingat bahwa struktur organisasi pemerintahan daerah memiliki kedalaman struktur organisasi yang cukup besar. Jadi selain kepemimpinan puncak, perlu juga diperhatikan pemimpin-pemimpin lain dibawahnya.

5. Perubahan Sikap dan paradigma dari SDM Pemerintah Kota Yogyakarta;

Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan *eGovernment*, diperlukan komitmen

yang kuat dari seluruh SDM pemerintah kota. Implementasi *eGovernment* baik membutuhkan perubahan budaya dari SDM dari sistem manual ke dalam sistem digital.

6. Masalah-masalah lain

Masalah-masalah lain adalah perubahan-perubahan yang belum tercantum dalam butir-butir diatas.

B. Manajemen Resiko

Pengoperasian sebuah sistem *eGovernment* agar dapat beroperasi tanpa henti. Gangguan sekecil apapun yang menyebabkan sistem tidak berfungsi harus diperhitungkan dan dicari solusi untuk melakukan pencegahan. Langkah-langkah untuk menanggulangi hal tersebut :

1. mempelajari resiko yang timbul
2. mencari jalan pemecahan dari suatu resiko yang timbul
3. mengkaji bagaimana mengurangi probabilitas kemunculan resiko
4. meminimalkan resiko

Resiko-resiko yang mungkin timbul antara lain :

1. Listrik mati, untuk ini diperlukan UPS yang memberikan *supply* dalam waktu yang cukup untuk melakukan *backup*.
2. Virus, untuk ini perlu update dan pemasangan anti virus terbaru, diikuti dengan mengingatkan kesadaran pengguna untuk selalu memeriksa komputernya.
3. Kehilangan koneksi, untuk ini perlu disediakan *server dial-up*.

C. Tahap pengembangan

Tahap pengembangan *eGovernment* dasarnya adalah mengembangkan seluruh komponen *eGovernment*.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. SDM per instansi :

- Operator, Pengelola data, content manajer, sistem analis

b. SDM instansi yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi:

- Kepala instansi yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi, tim penjaminan mutu, unit pengelola proyek dan program, bagian infrastruktur, bagian database, bagian pengembangan, sistem analis

Untuk memenuhi SDM tersebut diperlukan Training dan pelatihan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Training operator | 3 sdm / instansi/tahun |
| b. Pelatihan pengelola data | 1 sdm / instansi / tahun |

2. Perangkat Keras dan Perangkat lunak

Pemenuhan perangkat keras dan perangkat lunak *eGovernment* dari instansi yang melayani kebutuhan internal, melayani masyarakat dan perangkat untuk memfasilitasi kebutuhan pelayanan untuk kelompok bisnis.

3. Jaringan dan Internet.

Fasilitas komunikasi direalisasikan mulai dari yang digunakan untuk melayani kebutuhan internal baru kemudian yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.

4. Data

Terhadap data-data yang selama ini telah ada, mulai dipikirkan untuk dilakukan unifikasi. Langkah untuk ini diawali dengan pemetaan detail data yang ada pada setiap instansi, pemetaan layanan. Selanjutnya grand desain data secara keseluruhan mencakup seluruh aspek *eGovernment* Kota Yogyakarta.

5. Organisasi.

Adanya *eGovernment* Yogyakarta yang membutuhkan kesatuan data mengakibatkan jabatan tertentu yang mempunyai kapasitas mengkoordinir seluruh instansi. Dari sini selanjutnya dibentuk unit-unit lebih kecil dibawahnya sebagai pendukung sistem *eGovernment* Kota Yogyakarta

6. Masyarakat.

eGovernment membutuhkan masyarakat yang menyadari akan peran dari *eGovernment*. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang gencar ke masyarakat.

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Master Plan eGovernment Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun *eGovernment* di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan *good governance*.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

